

## Perangi Knalpot Bising, Kota Bogor Bentuk Tim Gabungan

**BOGOR (IM)** - Guna mengatasi maraknya knalpot bising, Pemerintah Kota (Pemkot) membentuk tim gabungan Polisi, TNI, dan Kejaksaaan. Hal tersebut guna menindak anggota di lintas instansi yang menggunakan knalpot bising.

Hal itu dikatakan Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana, Brigjen TNI Achmad Fauzi, saat penemuan 363 knalpot bising di Mapolresta Bogor Kedung Halang, Kota Bogor, Selasa (16/3).

Kata dia, TNI akan mendukung penuh untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.

"Mari kita ciptakan Kota Bogor yang aman, tertib dan nyaman dan damai. Penindakan tanpa pandang bulu," tegas Achmad.

Penindakan knalpot bising juga untuk mencegah kejadian kriminalitas yang lebih besar. Biasanya, para pemilik knalpot bising ini membuat kelompok-kelompok atau geng.

"Geng ini rawan bentrok.

Baik konflik antar-mereka maupun terjadinya aksi kriminalitas, yang jelas tahun lalu sudah terjadi ada 2 orang meninggal karena geng motor," paparnya.

Achmad menambahkan ke depan, akan dilakukan patroli gabungan bersama untuk menindak pemilik juga bengkel yang menyediakan reparasi knalpot bising.

Dalam delapan hari Polresta Bogor Kota merazia 363 knalpot bising. Penyebab tawuran di Kota Bogor di antaranya disebabkan banyaknya pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo menabahkan, tidak sedikit berbagai kejadian tawuran ataupun lainnya, itu diawali dari knalpot bising.

Lebih lanjut, Kombes Pol Susatyo menjelaskan, akan menindak tegas siapapun yang menggunakan knalpot bising sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● **gio**

## Kecanduan Game di Gawai, 4 Remaja Dirawat di Rumah Sakit Jiwa

**BANDUNG (IM)** - Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/3). Dia menemukan empat remaja yang kecanduan game di gawai yang menjalani perawatan jalan.

Keempat remaja itu ditemui di salah satu ruangan konsultasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Uu sempat berdialog dengan mereka.

"Kenapa dirawat di sini? Sudah berapa lama menjalani perawatan di sini?" tanya Uu kepada salah seorang remaja putra yang kecanduan game.

"Suka ngebut hp (handphone). Sudah dua minggu," jawab remaja itu.

Uu mendokan agar para remaja putra itu bisa lepas dari kecanduan game di gawai. "Jadi saya datang ke sini untuk meyakinkan, dan memang dampak handphone ini sangat luar biasa," ucapnya.

Menurut dia, saat ini banyak anak-anak yang ketergantungan atau kecanduan terhadap gawai. Faktor penyebab kecanduannya beragam. "Penyebabnya bisa karena awalnya gangguan stres mengurangi diri dan punya teman kemudian pegang telepon seluler karena enggak ada kegiatan. Bisa juga mereka enggak punya komorbid atau penyakit penyerta kemudian pegang handphone," sebut Uu seperti dilansir Antara.

Melihat fenomena kasus anak kecanduan games di gawai, Uu meminta ke para orang tua untuk bisa mengawasi anak dengan berbagai situasi dan kondisi serta memberikan pendidikan spiritual kepada anak.

"Jangan biarkan anak mengurung diri sendiri di kamar, anak harus ceria, harus bergaul dengan temannya tapi jangan asal bergaul. Anak harus diberikan pendidikan ukhrowi dengan menanggapi Ustad, atau yang nonmuslim (panggil) tokoh agama, untuk menjaga keseimbangan," kata dia. ● **pur**



IDN/ANTARA

### MELUKIS BALAI PEMUDA

Seniman melukis Balai Pemuda Surabaya di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/3). Kegiatan melukis yang dilakukan oleh Komunitas Pelukis Cat Air itu untuk mengabadikan bangunan cagar budaya yang dibangun pada tahun 1907.

## Ini Penjelasan Dinkes Soal Pemindahan 157 Jenazah dari TPU Cikadut

**BANDUNG (IM)** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menanggapi kabar sejumlah jenazah yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut dipindahkan oleh ahli waris. Pemindahan dilakukan karena hasil uji usap PCR menunjukkan jenazah tersebut negatif Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menjelaskan pasien yang meninggal dan memiliki gejala Covid-19 namun hasil uji usap belum keluar maka prosedur yang digunakan yaitu protokol Covid-19. Selanjutnya, jika hasil uji usap menunjukkan negatif dan ingin memindahkan maka dapat dilakukan.

"Apabila hasilnya keluar dan hasilnya negatif dan keluarga ingin memindahkan ke tempat pemakaman yang mereka inginkan ada prosedur yang tinggal bilang kepada TPU Cikadut sepanjang tidak ada keberatan di tempat," ujarnya, Selasa (16/3).

Ia mengatakan, virus korona hidup pada inang yang masih hidup dan menyebar. Selanjutnya jika inang sudah tidak hidup maka virus pun akan mati.

Ahyani mengatakan pemindahan jenazah yang terbukti negatif Covid-19 harus mendapatkan persetujuan dari tempat baru pemakaman. Ia mengatakan, ahli waris dapat mengajukan kepada Dinas Tata Ruang Kota Bandung.

Sebanyak 157 jenazah yang sempat dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus Covid-19 di Cikadut, Kota

Bandung dipindahkan oleh ahli waris setelah hasil uji usap PCR menunjukkan negatif Covid-19. Jenazah tersebut dimakamkan di pemakaman yang berdekatan dengan pihak keluarga.

Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah III yang menangani TPU Cikadut, Cikutra dan Nagrog, Kota Bandung, Sumpena mengatakan jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU khusus Covid-19 di Cikadut sebanyak 1.149. Sedangkan, 6 jenazah lainnya dimakamkan di tempat lain sebelum penunjukan TPU Cikadut sebagai TPU khusus Covid-19 dilakukan.

"Total pemakaman Covid-19 dengan protokol Covid-19 sampai sekarang 1.149 di TPU Cikadut, di luar TPU Cikadut 6 jenazah," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/3).

Jumlah total jenazah di TPU Cikadut dan TPU lainnya menjadi 1.155. Ia menuturkan, dari jumlah tersebut jenazah asal Kota Bandung mencapai 969 jenazah terdiri dari 633 positif Covid-19, 322 suspek, dan 14 probable. Sedangkan jenazah dari luar kota seperti Cimahi, Garut, Tasikmalaya dan Medan terdiri dari 126 positif, suspek 57 dan probable 3.

Sumpena mengatakan dari total tersebut sebanyak 157 jenazah telah dipindahkan oleh ahli waris yang berasal dari Kota Bandung dan luar Kota Bandung ke pemakaman yang lebih dekat dengan keluarga.

Permohonan pemindahan dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris. ● **pur**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### WAKSINASI BAGI PENGEMUDI OJEK DARING

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 untuk pengemudi ojek daring di Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/3). Dinas Kesehatan Kota Bandung bekerjasama dengan Grab memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada pengemudi ojek daring guna memberikan rasa nyaman kepada penumpang yang akan menggunakan moda transportasi daring.

## Tangkal Korona, Ridwan Kamil Lepas 500 'Pasukan Khusus' ke Puskesmas

Dari hasil kajian, ujung tombak penanganan Covid-19 di tengah masyarakat adalah puskesmas.

Sehingga perlu ada 'pasukan khusus' di puskesmas untuk menangani pandemi. Ke-500 orang dalam pasukan khusus itu diseleksi secara ketat dari 6.900 orang yang melamar.

**BANDUNG (IM)** - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melepas 500 orang tenaga kesehatan yang tergabung dalam program Puspa (Puskesmas Terpadu dan Juara). Ratusan orang ini akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas di Jabar khusus untuk menangani Covid-19.

Dari hasil kajian, kata Ridwan Kamil, ujung tombak penanganan Covid-19 di tengah masyarakat adalah puskesmas. Sehingga perlu ada 'pasukan khusus' di puskesmas untuk menangani pandemi.

"Komando Pasukan Khu-

sus yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas yang terpilih yang perjuangannya paling berat, karena kita meyakini dan hasil kajiannya bahwa kalau Covid mau dibereskan, ada satu yang selama ini kurang optimal yaitu berperangnya itu di Puskesmas," kata Ridwan Kamil di Command Center Jabar, Kota Bandung, Selasa (16/3).

500 orang dalam pasukan khusus itu diseleksi secara ketat dari 6.900 orang yang melamar. Usai terpilih, mereka akan dilatih selama tiga pekan untuk berjuang di puskesmas.

"Melakukan identifikasi secara terukur, kerjanya full time ngurus Covid kira-kira begitu. selama ini Covid itu diurus diambil sama orang-orang yang ada urusan lain, tapi Copass ini di urusan yang kita sebut Puspa ini pasukan khusus ini Kerjanya full time hanya ngurusin Covid," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Ke-500 orang ini mempunyai empat tugas utama, yakni mengidentifikasi pasien Covid-19 dan kontak eratnya, kemudian melakukan pencegahan dengan tindakan terukur dan ketiga memastikan pelayanan umum puskesmas tidak terganggu oleh pandemi.

"Keempatnya melakukan surveilans yang untuk dasar dari 3T, dan yang ke-5 nya melakukan komunikasi persuasi publik, pelibatan komunitas, sukseskan vaksinasi dan lain-lain," katanya.

"Kami membelanjakan sekitar Rp 80 miliar selama 6 bulan ini untuk kepada 100 Puskesmas (untuk PUSPA). mudah-mudahan

dengan strategi ini kasus di Jawa Barat bisa lebih menurun secara maksimal, sambil

kitanya juga beradaptasi, kan virusnya juga bermutasi," tutur Kang Emil. ● **pur**

### SEORANG WARGA BOGOR TERINFEKSI B117

**Wakil Wali Kota: Dia Sudah Kembali ke Luar Negeri**

**BOGOR (IM)** - Seorang warga Kota Bogor, Jawa Barat terinfeksi covid-19 mutasi B117 setelah pulang dari luar negeri.

Ternyata kasus tersebut sudah ditemukan pada 1 Februari 2021. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan Pemkot Bogor baru diberi tahu pada Senin (15/3) terkait hal tersebut. Dia pun menjelaskan pasien tersebut sudah kembali ke luar negeri untuk bekerja.

"Kasusnya 1 Februari 2021. Laki-laki. Itu (B117) baru ketahuan hasil genome tes dan yang bersangkutan sudah sembuh pulang ke luar negeri. Nah kita baru dikasih tahu semalam," ucap Dedie di Bogor, Selasa (16/3).

Dedie pun menjelaskan warga Kota Bogor itu ketahuan positif covid-19 saat tiba di bandara melalui tes swab. Dari hasil tersebut, warganya

itu langsung menjalani isolasi di Jakarta.

"Kan setiap yang dari luar negeri itu dikarantina dan tes usap. Hasilnya itu positif dan isolasi di Jakarta. Yang bersangkutan sudah sembuh dan sudah kembali bekerja lagi di luar negeri," ujarnya.

Atas dasar itu, Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan akan melakukan tracing dan monitoring terhadap keluarga yang bersangkutan.

Tujuannya agar tidak terjadi penularan dan menyebar lebih jauh.

"Nah kita harus ngecek dong, di Bogor ini dia tinggal di mana, kontak eratnya siapa saja. Jangan sampai mereka (keluarga) tidak tahu, kita tidak merespons sesuatu B117 ini menyebar. Kita sedang memonitor 16 keluarga mereka meski yang bersangkutan sudah pulang (kembali ke luar negeri)," tuturnya. ● **gio**

## Kodim 0621 dan Pemkab Bogor, Sinergitas Tumbuhkan Ekonomi

**BOGOR (IM)** - Komando Distrik Militer (Kodim) 0621/Kabupaten Bogor terus melakukan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di saat pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan Dandim 0621, Letkol Syukur Hermanto saat siaran langsung di Radio Teman 93,5 FM, Senin (15/3).

Dandim 0621 Letkol Syukur Hermanto mengatakan, sinergitas dan kebersamaan dengan Pemkab Bogor terus diperkuat untuk menyikapi berbagai persoalan di wilayah Kabupaten Bogor. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 agar dapat teratasi dan mendapatkan solusi terbaik.

"Tentunya ini kami lakukan, bukan semata-mata karena kami ada di sini, tapi bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, di mana salah satunya tugas kita membantu pemerintah daerah untuk bersama-sama secara langsung bersinergi melaksanakan ke-

giatan sesuai dengan bidang tugas pokok kita masing-masing. Ini jadi tugas kami, bagaimana pemerintah daerah dapat terbantu, terbantu dan kemudian masyarakat juga dapat merasakan hasil yang baik," jelas Dandim.

Dandim 0621 menegaskan, beberapa sinergitas dengan Pemkab Bogor dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor antara lain, mendukung optimalisasi kegiatan PSBB dan PPKM Skala Mikro di Kabupaten Bogor serta aktivitas pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor.

"Jadi ini bukan situasi yang mudah, selain melakukan pembatasan kepada masyarakat kita juga tetap harus menyelamatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka secara layak," tegasnya.

Lebih lanjut Syukur menjelaskan, saat ini menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor, program melalui TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD) dilaksanakan sejak bulan Agustus 2020. Ini untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, mulai dari kegiatan fisik pembangunan jalan, rehab masjid dan mushola, pembangan RTLH, hingga sasaran non fisik lainnya.

"TMMD ini untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada masyarakat, terlebih mereka yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19, untuk sasaran non fisik salah satunya adalah kita ingin membangkitkan kembali rasa solidaritas, dan gotong royong di kalangan masyarakat yang saat ini mulai pudar khususnya di daerah perkotaan," katanya.

Dengan demikian, masih kata Dandim, soliditas dan sinergitas itu menjadi kunci membangun Kabupaten Bogor.

"Dari sekian tempat di mana saya ditugaskan, Kabupaten Bogor luar biasa dari kekompakan, solidaritas, dan kebersamaan yang dibangun antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat," tukasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

### PROGRAM RUTILAHU JAWA BARAT

Seorang warga bermain bersama hewan peliharaannya di kawasan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (16/3). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk 1.480 rumah di Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2021 dengan besaran dana masing-masing rumah Rp17,5 juta.

## KPK Minta Kepala Daerah di Jabar Rapatkan Barisan Berantas Korupsi

**BANDUNG (IM)** - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk merapatkan barisan dalam pemberantasan korupsi salah satunya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bertema "Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah" yang berlangsung di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Selasa (16/3).

"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," tutur Firlil dalam keterangannya.

Menurut Firlil korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat.

Menjadi rangkaian dalam pertemuan tersebut, seluruh 27 kepala daerah di Jabar yang hadir menandatangani komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Sementara itu Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengingatkan bupati dan wali kota di wilayah Jabar, khususnya yang baru saja menjabat untuk waspada dalam mengelola pemerintahannya.

"Pertemuan kali ini penting karena banyak kepala daerah baru sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasinya. Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlina oleh posisi baru. Sesuai arahan

KPK, juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Harga termahal kepala daerah adalah political will. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauh praktik transaksional," ucap dia.

Sesuai data KPK per2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Jabar yang tercatat dalam sistem aplikasi "Monitoring Centre for Prevention" (MCP) adalah 91,80 persen.

Total skor tersebut terdiri atas optimalisasi penerimaan daerah sebesar 67,79 persen, manajemen aset daerah 93,70 persen, perencanaan dan penganggaran APBD 96,40 persen, pengadaan barang dan jasa 91,68 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 100 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 94,96 persen, dan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 96,72 persen.

Kemudian terkait program sertifikasi aset daerah, berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jabar, hingga akhir tahun 2020 total sertifikasi yang sudah diterbitkan untuk seluruh pemda di Jabar adalah 1.912 bidang tanah.

Jumlah tersebut terdiri atas pemerintah provinsi sebanyak 355 bidang, pemerintah kabupaten dan kota 1.480 bidang, dan pemerintah desa 77 bidang.

Sedangkan sertifikasi yang telah terbit untuk BUMN di wilayah Provinsi Jabar sebanyak 590 bidang serta untuk BUMD sebanyak 49 bidang.

Menutup pertemuan, Firlil meminta Gubernur Jabar untuk menegur bupati atau wali kota di wilayah Jabar yang nilai MCP-nya masih rendah demi mendorong upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah. ● **pur**